



Pantau Profesionalitas SPMB 2026

Jangan Sampai Muncul Lagi Istilah “Sekolah Buangan”

YOGYAKARTA, Joglo Jogja – Sorotan tajam dialamatkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Kalangan legislatif mewanti-wanti agar pengelolaan sistem *Real Time Online* (RTO) dilakukan secara transparan dan profesional demi mengikis stigma diskriminatif. Seperti istilah “sekolah buangan” yang kerap muncul di tengah masyarakat.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi menegaskan, Dindikpora sebagai domain utama dari SPMB di tahun 2026 harus selektif dalam melakukan verifikasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sinkronisasi data yang buruk dinilai menjadi celah utama yang memicu ketidakadilan sistemik bagi calon siswa.

“Dinas Pendidikan harus betul-betul selektif dan profesional melakukan verifikasi berbasis NIK. Jangan sampai ada data ganda, sehingga merugikan calon siswa yang akan mendaftar,” ujar Solihul



PERMUSKABALOGAN
Solihul Hadi
 Sekretaris Komisi D DPRD
 Kota Yogyakarta

Hadi, kemarin (23/6).

Menurutnya, penerapan SPMB berbasis domisili juga memikul beban berat untuk menyelesaikan problem ketimpangan sistem pendidikan. Realitas musiman menunjukkan adanya penumpukan pendaftar yang luar biasa di sekolah-sekolah yang berada di pusat kota. Sebaliknya, sejumlah SD negeri yang terletak di wilayah pinggiran justru terus-menerus dirundung krisis murid baru.

Ketimpangan sebaran murid inilah yang dinilai menyuburkan kembali sentimen negatif di masyarakat mengenai adanya kasta sekolah, termasuk sebutan “sekolah buangan” bagi sekolah yang sepi peminat atau hanya menjadi pilihan terakhir.

Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini menyatakan bahwa pihaknya tahun ini memperketat pengawasan terhadap seluruh

jalur seleksi SPMB 2026, terutama pada jalur jarak atau zonasi radius. DPRD mengungkap sebuah kebijakan baru, penghapusan penggunaan aplikasi Google Maps.

Menurut Darini, langkah ini diambil karena aplikasi peta digital tersebut terbukti tidak presisi dan sering kali memicu salah hitung yang merugikan warga di sekitar sekolah.

“Mulai tahun ini tidak menggunakan Google Maps karena aplikasi ini ternyata tidak presisi. Ada temuan (kasus) rumah yang hanya berhadapan tembok dengan sekolah justru kalah dengan yang jaraknya puluhan meter. Ternyata setelah diukur dengan Google Maps, jalurnya memutar jalan, bukan ditarik garis lurus,” keluh Darini.

Tahun ini, lanjut Darini, khusus jalur jarak ini akan menggunakan zonasi RW. Jadi, berapa pun jaraknya jika alamatnya sesuai dengan RW tempat sekolah bisa masuk dari kuota jarak.

Dengan perbaikan instrumen ukur jarak pada jalur radius serta pengawasan RTO yang ketat, Komisi D berharap pelaksanaan SPMB Kota Yogyakarta tahun 2026 ini melahirkan pemerataan kualitas pendidikan yang riil, transparan, dan terbebas dari bayang-bayang label sekolah favorit maupun “sekolah buangan”. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005